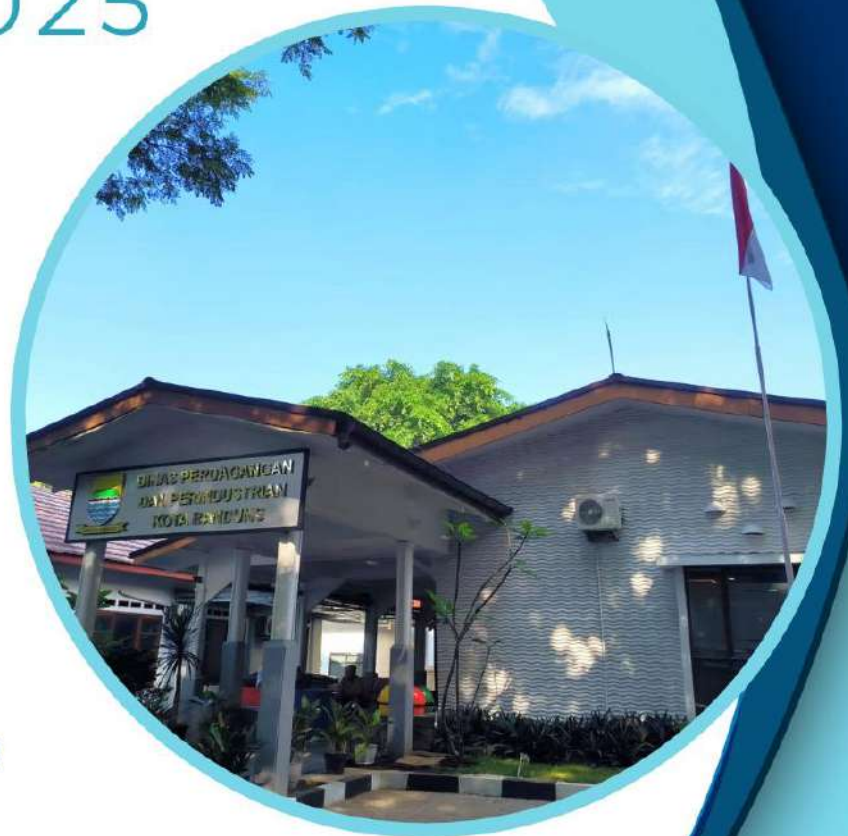




Dinas Perdagangan  
dan perindustrian  
Kota Bandung

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



Jl. Tamansari No. 59  
Kota Bandung  
Jawa Barat 40132

# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya, telah disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta peraturan daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 05 tahun 2009 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 ini sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Renja dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Bandung.

Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Bandung maupun langkah-langkah yang diperlukan,



diharapkan akan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman dan mengacu pada Renstra yang memuat tentang kebijakan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pada sektor perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung.

Bandung, 5 Maret 2024

Pt KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA BANDUNG



**Drs. Ronny Armad Nurudin, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 196803121987091001

# DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-2
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021 DAN MONITORING RENJA TAHUN 2022 .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 .....	II-2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung .....	II-23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	II-26
2.4 Review terhadap RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 .....	II-27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-39
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISDAGIN KOTA BANDUNG .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-2
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	III-5
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023 .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2023 sesuai Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 .....	IV-1
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kota Bandung .....	II-7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung .....	II-25
Tabel 2.3	Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2023 .....	II-28
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Bandung .....	II-29
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Urusan Perdagangan .....	III-5
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Urusan Perindustrian .....	III-5
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2023 .....	III-6
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kota Bandung .....	IV-5



## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, Renja Tahun 2025 merupakan perencanaan Tahun Ke-2 Renstra 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja



Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan



utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting setiap Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan



Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen



Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 52)



13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 62);
14. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 adalah untuk penyelarasan dan sinkronisasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024-2026 serta untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025, dan sasaran kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
4. Sebagai instrumen untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.



## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**



## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.



Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

### 2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;



2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyajikan Tabel 4 mengenai Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Bandung.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Menyajikan Tabel 5 mengenai rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

## BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022 DAN MONITORING RENJA TAHUN 2023

Proses penyusunan suatu dokumen perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Tahun 2022, total alokasi anggaran Belanja Langsung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebesar **Rp. 31.553.657.933 ,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 29.815.803.631,00** atau **94,49%** yang dilaksanakan melalui kegiatan Non Urusan (Adum) sebanyak 1 Program, 6 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan; Urusan Pilihan Perdagangan sebanyak 5 Program, 5 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan; serta Urusan Pilihan Perindustrian sebanyak 3 Program, 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.



Adapun realisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 20.405.420.133,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 19.226.304.546,00** atau **94,22%** yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) sub kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor mendapat alokasi anggaran sebesar

**Rp. 967.303.560,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 934.621.326,00**

atau **96,62%**, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
  2. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
  3. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

## 3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.549.923.850,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 3.477.864.014 ,00** atau **97,97%**, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

#### **4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 697.607.980,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 676.561.500,00** atau **97,00%**, yang dilaksanakan melalui melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
  2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

#### **5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.489.221.070,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.433.898.698,00** atau **96,29%** yang dilaksanakan melalui melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
  2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan



3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

## 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.565.670.330,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 4.188.902.787,00** atau **91,75%**, yang dilaksanakan melalui melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
  2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
  3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



**Tabel 1**  
**Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023**  
**Dan Rencana Pencapaian Tahun 2024**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>RENSTRA MURNI</b>										
3	Urusan Pilihan									
3.06	Perdagangan (Non Urusan/Adum)									
3.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	0	100%	-	-	100%	100%	100%
3.06.01.02	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	10	0	10	-	-	10	10	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
3.06.01.06	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	0	2	-	-	2	2	<b>100%</b>
3.06.01.08	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan	2	0	2	-	-	2	2	<b>100%</b>
3.06.01.09	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	0	100%	-	-	100%	100%	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	0	100%	-	-	100%	100%	<b>100%</b>
3.06.01.10	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian	Jumlah paket Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2	0	2	-	-	2	2	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
3.06.01.11	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	0	100%	-	-	100%	100%	<b>100%</b>
3.06.01.12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4	0	4	-	-	4	4	<b>100%</b>
3.06.01.13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	0	4	-	-	4	4	<b>100%</b>
3.06.01.14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0	-	-	-	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	4	0	4	-	-	4	4	100%
3.06.01.17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	0	4	-	-	4	4	100%
3.06.01.18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	0	8	-	-	8	8	100%
3.06.01.19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	12	-	-	12	12	100%
3.06.01.20	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	0	100%	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.xx	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	0	12	-	-	12	12	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	0	12	-	-	12	12	100%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	0	100%	-	-	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	46	0	46	-	-	46	46	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	0	1	-	-	1	1	100%
<b>3.06.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.06.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100 orang	0	100 orang	-	-	100 orang	100 orang	100%
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>									
<b>3.06.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Pertumbuhan Nilai Ekspor</b>	<b>0,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,36%</b>	<b>120%</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Ikut Serta Dalam Pameran Berorientasi Ekspor	24 pelaku usaha	<b>0</b>	<b>22 pelaku usaha</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 pelaku usaha</b>	<b>20 pelaku usaha</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha Yang Bertransaksi Ekspor	10 pelaku usaha	-	<b>10 pelaku usaha</b>	-	-	<b>25 pelaku usaha</b>	<b>25 pelaku usaha</b>	<b>100%</b>
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dilatih	300 pelaku usaha		<b>250 pelaku usaha</b>			<b>100 pelaku usaha</b>	<b>100 pelaku usaha</b>	<b>100%</b>
3.06.17.17	Kegiatan Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri	Jumlah produk Siap Ekspor			-	-	-	-	-	-
<b>3.06.21</b>	<b>Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>15%</b>		15%	-	-	15%	<b>8,1%</b>	<b>185,19%</b>
3.06.21.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar dan toko modern	48		48	-	-	<b>48</b>	<b>48</b>	100%
		Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok	12		7	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pelaku usaha barang pokok yang dibina	350		250	-	-	200	200	100%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi pasar, pasar murah dan bazaar murah	2 Kali Bazaar Murah, 2 Kali Operasi Pasar, 2 Kali Pasar Murah di 30 Kecamatan		2 Kali Bazaar Murah, 2 Kali Operasi Pasar, 2 Kali Pasar Murah di 30 Kecamatan	-	-	5	5	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar, pasar murah dan bazaar murah	6		4	-	-	2	3	150%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Penting	2		2	-	-	7	7	100%
		Jumlah Pelaku Usaha Barang Penting Yang Dibina	2214		1314	-	-	525	567	108%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.23	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Daya Saing Perdagangan	94,64	-	87,11	-	-	83,33	83,49%	100,19%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang terbina	80	-	70	-	-	65	65	100%
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	600		400			200	200	100%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang bermitra	40		35			25	25	100%
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang bermitra dengan pusat perbelanjaan/ toko swalayan/ marketplace	300		20	-	-	50	50	100%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang ikut serta	100		100	-	-	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>pada pameran dalam negeri</b>								
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang ikut serta pada pameran dalam negeri	296		236			206	<b>312</b>	<b>151,45%</b>
3.06.24	<b>Program Standardisasi Kemetrolgian</b>	<b>Persentase Alat UTTP yang Terstandardisasi</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		<b>Meningkatnya alat UTTP yang terstandardisasi</b>	<b>100</b>		100	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
3.06.24.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Tera/Tera Ulang</b>	<b>Persentase Pengawasan alat UTTP</b>	100		100	-	-	100	100	%
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang Diawasi	15000		9.500			7500		
		Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	840		450			250	250	100%
		Pengawasan Kemetrolgian	132		84			17	17	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>3.07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>							-		
	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing</b>	<b>76,5</b>		<b>65,58</b>			<b>60,14</b>	<b>60,30</b>	<b>100,27%</b>
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot</b>	<b>Persentase pelaku IKM yang bermitra dan bekerjasama dengan pihak terkait</b>	<b>50</b>		<b>50</b>			-	-	-
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti fasilitasi kerjasama	<b>40</b>		<b>40</b>			-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang terkaji dan terpetakan	<b>10</b>		<b>10</b>			-	-	-
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot</b>	<b>Persentase pelaku IKM yang mengikuti pelatihan</b>	<b>250</b>		<b>230</b>			-	-	-
		<b>Persentase pelaku IKM yang memiliki sertifikat keahlian</b>	<b>35</b>		<b>25</b>			-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang dilatih	250		230			-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang memiliki sertifikat keahlian	35		25			-	-	-
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan kelembagaan sentra industri	7		7			-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang memiliki legalitas kelembagaan	7		7			-	-	-
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase produk IKM yang terstandarisasi</b>	475		262			-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Produk IKM yang mendapatkan sertifikasi halal, SNI, Uji Mutu dan TKDN IK	650		530			-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Produk IKM yang berinovasi (DBHCHT)	50		50			-	-	-
		Jumlah Produk IKM yang berinovasi	155		125			-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku IKM mengikuti pelatihan dan pelayanan Teknologi Industri	500		250			150	150	100%
	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing</b>	<b>76,5</b>		<b>65,58</b>			<b>60,14</b>	<b>60,14</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase produk IKM yang meluas jaringan pemasarannya</b>	<b>65</b>		<b>20</b>			-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang mendaftar di SIINAS	300		200			-	-	-
		Jumlah IKM yang meningkat jaringan pemasaran produknya	175		125			-	-	-



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur



pendukung tugas kepala daerah. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 2 (dua) pasal yang menyatakan dan menetapkan fungsi dan peran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai Kepala Perangkat Daerah.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	86,5	87	87,5	-	-	-	Nilai
2	Pertumbuhan nilai ekspor	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	Persen
3	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	-	-	87,11	90,88	94,64	-	-	-	Persen
4	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	-	-	65,58	78,83	76,5	-	-	-	Persen
5	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	-	-	15	15	15	-	-	-	Persen

*Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026*

## 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat untuk Tahun 2025 diproses melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang dimulai dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kota untuk selanjutnya program dan kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat akan di akomodir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangan ataupun secara lintas sektoral.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak mengusulkan Kamus Usulan untuk Musrenbang, sehingga pada Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak terdapat kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat.



## TUJUAN DAN SASARAN DISDAGIN KOTA BANDUNG

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan startegi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung, yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

### **A. Tugas Pokok**

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

### **B. Fungsi**

1. Perumusan kebijakanlingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan telah diselaraskan dengan Renstra kementerian maupun arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.



Tujuan dan Sasaran Pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, yaitu

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota
2. Terwujudnya perdagangan dan perindustrian yang berdaya saing

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Nilai Ekspor
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya daya saing perdagangan;
4. Meningkatnya daya saing perindustrian.

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target		
				Realisasi 2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM "Baik"</b>	<b>Persen</b>	<b>68,33</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
1.1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	85,94	86,43	86,5
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	<b>Poin</b>	3,94	4,51	<b>5,07</b>



2.1	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	Persen	0,35	0,36	0,35
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	Persen	79,56	83,49	87,11
		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	Persen	51,61	60,30	65,58
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Persen	3,9	8,1	15



# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

### 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada bab IV ini telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya, sebagaimana berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 3). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 5). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - 6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
    - 1). Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
    - 2). Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan



- 3). Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

III. Program Pengembangan Ekspor

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1). Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
  - 2). Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
  - 3). Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

IV. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  - 1). Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
  - 2). Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

V. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - 1). Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
  - 2). Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
  - 3). Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

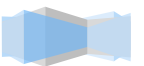
1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - 1). Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
  - 2). Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri



- 3). Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 4). Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Selanjutnya uraian rumusan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan diuraikan secara lengkap pada tabel sebagai berikut :

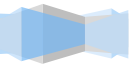




**Tabel 5**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100	19.074.948.704	APBD	-	100	22.414.806.461
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Bandung	10	173.950.000	APBD	-	10	259.803.550
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung	2	31.040.000	APBD	-	2	102.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bandung	6	94.830.000	APBD	-	6	71.123.550



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	2	48.080.000	APBD	-	2	86.130.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>13.531.843.612</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100</b>	<b>15.419.961.377</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Bandung	65	13.531.843.612	APBD	-	70	15.419.961.377
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>152.793.487</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100</b>	<b>379.790.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bandung	2	47.235.595	APBD	-	2	179.790.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung	65	105.557.892	APBD	-	70	200.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>1.349.475.141</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100</b>	<b>2.148.284.973</b>



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Umum Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Bandung	4	94.731.840	APBD	-	4	131.252.275
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bandung	4	247.227.406	APBD	-	4	677.881.311
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Bandung	4	115.526.207	APBD	-	4	161.999.666
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bandung	4	250.482.600	APBD	-	4	300.083.374
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bandung	4	85.636.500	APBD	-	4	138.565.174



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	8	8.617.588	APBD	-	8	15.037.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12	547.253.000	APBD	-	12	723.466.173
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>2.807.152.964</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>2.643.516.996</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bandung	12	272.921.312	APBD	-	12	250.391.196
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bandung	12	65.456.700	APBD	-	12	95.811.900



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bandung	12	2.468.774.952	APBD	-	12	2.297.313.900
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>1.059.733.500</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>1.563.449.565</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bandung	46	664.446.300	APBD	-	46	1.113.449.565
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Bandung	1	395.287.200	APBD	-	1	450.000.000
	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Pertumbuhan Nilai ekspor</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.657.383.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.557.383.000</b>



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang di promosikan pada pameran berorientasi ekspor</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>10</b>	<b>536.813.770</b>	<b>APBD</b>	-	<b>10</b>	<b>634.188.750</b>
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kota Bandung	20	536.813.770	APBD	-	22	634.188.750
	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang mengikuti misi dagang</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>10</b>	<b>727.029.980</b>	<b>APBD</b>	-	<b>10</b>	<b>513.655.000</b>
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kota Bandung	5	727.029.980	APBD	-	6	513.655.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Kota Bandung	5	393.539.250	APBD	-	5	409.539.250
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kota Bandung	105	393.539.250	APBD	-	110	409.539.250
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase daya saing pelaku usaha perdagangan dalam negeri	Kota Bandung	87,1	2.095.024.000	APBD	-	90,8	2.615.263.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang terbina	Kota Bandung	70	323.950.000	APBD	-	75	563.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kota Bandung	180	323.950.000	APBD	-	250	563.500.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase peningkatan pelaku usaha yang bermitra</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>30</b>	<b>360.721.500</b>	<b>APBD</b>	-	<b>35</b>	<b>567.111.500</b>
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kota Bandung	200	360.721.500	APBD	-	300	567.111.500
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase peningkatan pelaku usaha yang ikut serta pada pameran dalam negeri</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>1.410.352.500</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100</b>	<b>1.484.651.500</b>
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bandung	155	1.410.352.500	APBD	-	185	1.484.651.500
	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase Alat UTP yang Terstandardisasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>624.920.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100</b>	<b>994.920.000</b>



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Persentase Pengawasan alat UTTP</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100</b>	<b>624.920.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>100</b>	<b>994.920.000</b>
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Bandung	122000	416.693.000	APBD	-	122000	666.693.000
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang Diawasi	Kota Bandung	9236	208.227.000	APBD	-	9236	328.227.000
		Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	Kota Bandung	180		APBD	-	350	
		Pengawasan Kemetrolagian	Kota Bandung	15		APBD	-	27	
	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>	<b>Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15</b>	<b>3.220.000.080</b>	<b>APBD</b>	-	<b>15</b>	<b>1.325.855.000</b>
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15</b>	<b>3.220.000.080</b>	<b>APBD</b>	-	<b>15</b>	<b>1.325.855.000</b>



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Bandung	5	58.250.000	APBD	-	10	120.435.000
		Jumlah monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar dan toko modern	Kota Bandung	50		APBD	-	50	
		Jumlah pelaku usaha barang pokok yang di bina	Kota Bandung	50		APBD	-	100	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi pasar, pasar murah dan bazaar murah	Kota Bandung	30 Kali Pasar Murah dan 4 Kali Operasi Pasar	2.941.750.080	APBD	-	30 Kali Pasar Murah dan 5 Kali Operasi Pasar	856.808.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bandung	3		APBD	-	5	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bandung	5	220.000.000	APBD	-	2	348.612.000
		Jumlah Pelaku Usaha Barang Penting Yang Dibina	Kota Bandung	510		APBD	-	595	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	Kota Bandung	65,5	5.229.572.791	APBD	-	70,8	3.816.159.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaku IKM yang bermitra dan bekerjasama dengan pihak terkait	Kota Bandung	110	621.942.370	APBD	-	70	801.314.040



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti fasilitasi kerjasama	Kota Bandung	100	384.180.000	APBD	-	60	228.276.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Bandung	1		APBD	-	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang terkaji dan terpetakan	Kota Bandung	10	237.762.370	APBD	-	10	573.038.040
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Bandung	1		APBD	-	1	



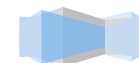
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaku IKM yang mengikuti pelatihan	Kota Bandung	130	890.492.630	APBD	-	140	811.120.960
		Persentase pelaku IKM yang memiliki sertifikat keahlian	Kota Bandung	5		APBD	-	10	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang dilatih	Kota Bandung	130	890.492.630	APBD	-	140	811.120.960
		Jumlah pelaku IKM yang memiliki sertifikat keahlian	Kota Bandung	5		APBD	-	10	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Bandung	1		APBD	-	1	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelembagaan sentra industri	Kota Bandung	-	-	APBD	-	-	-



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang memiliki legalitas kelembagaan	Kota Bandung	-	-	APBD	-	-	-
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase produk IKM yang terstandarisasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>80</b>	<b>3.717.137.791</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>2.203.724.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Produk IKM yang mendapatkan sertifikasi halal, SNI, Uji Mutu dan TKDN IK	Kota Bandung	80	1.142.687.306	APBD	-	90	554.465.060
		Jumlah Industri yang terdata di SIINAS	Kota Bandung	75		APBD	-	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Bandung	1		APBD	-	1	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Target Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Produk IKM yang berinovasi (DBHCHT)	Kota Bandung	50	534.681.791	APBD	-	50	534.681.791
		Jumlah Produk IKM yang berinovasi	Kota Bandung	35	1.686.412.694	APBD	-	-	511.221.149
		Jumlah IKM yang mengikuti festival industri	Kota Bandung	-		APBD	-	30	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Bandung	1		APBD	-	1	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku IKM mengikuti pelatihan Teknologi Industri	Kota Bandung	250	353.356.000	APBD	-	400	
		Jumlah Pelayanan Teknologi Industri	Kota Bandung	75		APBD	-	75	
	<b>JUMLAH</b>				<b>31.901.848.575</b>				<b>32.724.386.461</b>



# BAB V

## PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta kinerja pegawai.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam



pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

